

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2025
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 10, Jakarta Timur 13340, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (selanjutnya disebut Rapat) PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya disebut Perseroan).

Rapat dibuka pada pukul 15.03 WIB. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama : Wilan Oktavian	Direktur Utama : Kuntjara
Komisaris : Tjia Marwan	Direktur Pemasaran & Pengembangan : Rija Judaswara
	Direktur Operasi dan <i>Supply Chain Management</i> : Agus Pramono
	Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> , & Manajemen Risiko : Syailendra Ogan
	Direktur Teknik & Produksi : Verly Widiantoro

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.089.412.222 saham atau sebesar 69,8690329% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
4. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk RUPS;
7. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara 1

Berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), bahwa persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

2. Mata Acara 2

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf b dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, yang pada intinya bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPS.

3. Mata Acara 3

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf c dan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 3 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, bahwa penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

4. Mata Acara 4

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 11 dan Pasal 20 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT, bahwa besaran gaji/ honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

5. Mata Acara 5

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan antara lain dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2025 pada kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025, serta termasuk perubahan-perubahan lain yang diperlukan dalam rangka standarisasi Anggaran Dasar WIKA Grup sebagaimana usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas dalam Surat Nomor SE.01.00/A.DIR.00112/2026 tanggal 06 April 2026 perihal Usulan Penyesuaian dan Tambahan Mata Acara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk.

6. Mata Acara 6

Berdasarkan surat Pemegang Saham Mayoritas Nomor SE.01.00/A.DIR.00112/2026 tanggal 06 April 2026 perihal Usulan Penyesuaian dan Tambahan Mata Acara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk *juncto* ketentuan Pasal 15G Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN"), yang intinya untuk Rencana Kerja Tahunan Perseroan ("RKAP") disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan dengan terlebih dahulu ditelaah oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada RUPS dan untuk Rencana Jangka Panjang Perseroan ("RJPP") yang telah ditandatangani bersama Direksi dengan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.

7. Mata Acara 7

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2026, Bapak Dwi Gawan Islandhi H.B. yang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan telah meninggal dunia, sehingga mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan Komisaris Independen Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, diatur bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat. Untuk mata acara Rapat 1 ada yang memberikan tanggapan, sedangkan untuk mata acara rapat ke 2 sampai ke 7 tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka Pemegang Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Kesatu			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan tanggapan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.069.570.822 saham 99,674% dari yang hadir	292.800 saham 0,005% dari yang hadir	19.548.600 saham 0,321% dari yang hadir
Keputusan Rapat Kesatu	<ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00295/2.1030/AU.1/04/1680-5/1/III/2026 tanggal 26 Maret 2026, dengan opini "Wajar dalam semua hal yang material".3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengelolaan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas		

Mata Acara Rapat Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.069.570.822 saham 99,674% dari yang hadir	292.800 saham 0,005% dari yang hadir	19.548.600 saham 0,321% dari yang hadir
Keputusan Rapat Kedua	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp40.019.501.701,- (Empat Puluh Miliar Sembilan Belas Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah) sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp4.009.114.636,- (Empat Miliar Sembilan Juta Seratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp0,46 (Nol Koma Empat Puluh Enam Rupiah) per saham.b. Sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp36.010.387.065,- (Tiga Puluh Enam Miliar Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Lima Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan lainnya.		

	2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham.
--	--

Mata Acara Rapat Ketiga

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.069.570.822 saham 99,674% dari yang hadir	292.800 saham 0,005% dari yang hadir	19.548.600 saham 0,321% dari yang hadir
Keputusan Rapat Ketiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono dan Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2026. 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Mayoritas untuk melakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026, dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut. 		

Mata Acara Rapat Keempat

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.069.570.822 saham 99,674% dari yang hadir	207.800 saham 0,004% dari yang hadir	19.633.600 saham 0,322% dari yang hadir
Keputusan Rapat Keempat	Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada: <ol style="list-style-type: none"> a) Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris; dan b) Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Direksi, gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 		

Mata Acara Rapat Kelima

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.069.655.822 saham 99,675% dari yang hadir	207.800 saham 0,004% dari yang hadir	19.548.600 saham 0,321% dari yang hadir
Keputusan Rapat Kelima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana matriks yang telah ditayangkan; 2. Menyetujui untuk mengubah Pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan Keputusan butir 1 tersebut di atas; 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Kelima, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. 		

Mata Acara Rapat Keenam			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.069.655.822 saham 99,675% dari yang hadir	207.800 saham 0,004% dari yang hadir	19.548.600 saham 0,321% dari yang hadir
Keputusan Rapat Keenam	Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas, untuk menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah dikordinasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.		

Mata Acara Rapat Ketujuh									
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.								
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju						
	6.069.655.822 saham 99,675% dari yang hadir	207.800 saham 0,004% dari yang hadir	19.548.600 saham 0,321% dari yang hadir						
Keputusan Rapat Ketujuh	<p>Menyetujui usulan perubahan sesuai Surat Pemegang Saham Mayoritas Nomor SE.01.00/A.DIR.00189/2026 tanggal 13 Mei 2026 sebagaimana yang telah dibacakan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukuhkan Pemberhentian Sdr. Dwi Gawan Islandhi H.B. sebagai Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 12 Juni 2025, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2026, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. 2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini : <ol style="list-style-type: none"> a. Sdr. Agus Pramono sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 74 tanggal 30 Mei 2024, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta Selatan b. Sdr. Tjia Marwan sebagai Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 12 Juni 2025, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta Selatan <p>terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang bersangkutan selama menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p> 3. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: <table border="1" style="margin-left: 20px; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Semula</th> <th>Menjadi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Direktur Operasi dan Supply Chain Management</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> 4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Sdr. Andrianto sebagai Komisaris; b. Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo sebagai Komisaris Independen; c. Sdri. Indriani Widiastuti sebagai Komisaris. <p>terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> 5. Bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut. 6. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: <p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sdr. Wilan Oktavian sebagai Komisaris Utama; b. Sdr. Andrianto sebagai Komisaris; c. Sdri. Indriani Widiastuti sebagai Komisaris; d. Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo sebagai Komisaris Independen. <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama; b. Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan; c. Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i>, dan Manajemen Risiko; d. Sdr. Verly Widiantoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi 			No	Semula	Menjadi	1.	Direktur Operasi dan Supply Chain Management	-
No	Semula	Menjadi							
1.	Direktur Operasi dan Supply Chain Management	-							

	7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri, menghadap Notaris atau pejabat berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi Keputusan ini serta memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
--	--

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 16.59 Waktu Indonesia Barat.

G. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp4.009.114.636,- (Empat Miliar Sembilan Juta Seratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) untuk dibagikan kepada Para Pemegang Saham sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp0,46,- (Nol Koma Empat Puluh Enam Rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

1. Jadwal:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	25 Mei 2026 29 Mei 2026
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	26 Mei 2026 02 Juni 2026
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	29 Mei 2026
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025	12 Juni 2026

2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :

- a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **29 Mei 2026** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal **29 Mei 2026**.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **12 Juni 2026** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- c. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- e. Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen dimaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
SCHEDULE & TERMS OF PAYMENT OF CASH DIVIDEND FOR THE FISCAL YEAR 2025
PT WIJAYA KARYA BETON TBK**

The Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk, domiciled in East Jakarta City hereby notifies that on Wednesday, May 13 2026 at WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Lot 9-10, East Jakarta 13340, has held the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2025 (hereinafter referred to as the Meeting) of PT Wijaya Karya Beton Tbk. (hereinafter referred to as the Company).

The meeting opened at 15.03 Western Indonesian Time. The meeting was attended by the Company's Board of Commissioners and Directors, namely:

A. The Company's Board of Commissioners & Directors present at the Meeting

Board of Commissioners	Directors
President Commissioner : Wilan Oktavian	President Director : Kuntjara
Commissioner : Tjia Marwan	Director of Marketing & Development : Rija Judaswara
	Director of Operations & Supply Chain Management : Agus Pramono
	Director of Finance, Human Capital & Risk Management : Syailendra Ogan
	Director of Engineering & Production : Verly Widiantoro

B. Quorum of Attendance of Shareholders

The Meeting was attended by 6,089,412,222 shareholders or authorized shareholders of the Company, or 69.8690329% of all issued and fully paid shares in the Company.

C. Meeting Agenda

The agenda of the Meeting is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Financial Year 2025, as well as the Adoption of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending 31 December 2025, together with the Granting of Full Discharge and Release from Liability (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors for Their Management Actions and to the Board of Commissioners for Their Supervisory Actions Carried Out During the 2025 Financial Year;
2. Determination of the Allocation of the Company's Net Profit for the 2025 Financial Year;
3. Appointment of a Public Accountant and/or a Public Accounting Firm to Audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2026 Financial Year;
4. Determination of Salaries/Honoraria, including Benefits and Allowances for the 2026 Financial Year, and Remuneration for Performance in the 2025 Financial Year for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;
5. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association;
6. Delegation of Authority for Approval of the 2026-2030 Company Long-Term Plan (RJPP) and the 2027 Company Work and Budget Plan (RKAP) and its Amendments from the GMS to the Party Appointed by the GMS;
7. Approval of the Changes to the Composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.

The explanation of the agenda of the Meeting is as follows:

1. Agenda 1

Pursuant to Article 12 Verse 3 of the Company's Articles of Association in conjunction with Articles 69 and 78 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("UUPT"), the approval of the annual report, including the adoption of the financial statements and the supervisory report of the Board of Commissioners is carried out by the General Meeting of Shareholders.

2. Agenda 2

Pursuant to the provisions of Article 12 Verse 2 Point b and Article 25 of the Company's Articles of Association, read in conjunction with Article 70 and Article 71 Verse 1 of the Limited Liability Companies Act (UUPT), which essentially stipulate that the allocation of the Company's net profit is decided by the General Meeting of Shareholders.

3. Agenda 3

Pursuant to the provisions of Article 12 Verse 2 Point c and Article 12 Verse 4 of the Company's Articles of Association, read in conjunction with Article 3 Verse 1 of Financial Services Authority Regulation No. 9 of 2023 on the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, the appointment and dismissal of Public Accountants and/or Public Accounting Firms to provide audit services for annual historical financial information must be decided by the Company's General Meeting of Shareholders, taking into account the proposal of the Board of Commissioners.

4. Agenda 4

Pursuant to the provisions of Article 17 Verse 11 and Article 20 Verse 14 of the Company's Articles of Association, read in conjunction with Article 96 Verse 1 and Article 113 of the Limited Liability Companies Act (UUPT), the amounts of salaries/honoraria and allowances for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be determined by resolution of the General Meeting of Shareholders.

5. Agenda 5

Amendments to the Company's Articles of Association were made, amongst other things, to align with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification ("KBLI") in the Company's business activities in accordance with Article 5 of Central Statistics Agency Regulation No. 7 of 2025, as well as other amendments required for the standardization of the Articles of Association of the WIKA Group, as proposed by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as the Majority Shareholder in Letter No. SE.01.00/A.DIR.00112/2026 dated 6 April 2026 regarding the Proposal for Adjustments and Additions to the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 Financial Year of PT Wijaya Karya Beton Tbk.

6. Agenda 6

Pursuant to the letter from the Majority Shareholder No. SE.01.00/A.DIR.00112/2026 dated 6 April 2026 regarding the Proposal for Adjustments and Additions to the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 Financial Year of PT Wijaya Karya Beton Tbk, in conjunction with the provisions of Article 15G of No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, as last amended by Law No. 16 of 2025 on the Fourth Amendment to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises ("SOE Law"), which essentially stipulates that the Company's Annual Work Plan ("Annual Work Plan") be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval, having first been reviewed by the Board of Commissioners prior to submission to the General Meeting of Shareholders, and that the Company's Long-Term Plan ("Long-Term Plan"), which has been jointly signed by the Board of Directors and the Board of Commissioners, be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

7. Agenda 7

That on Sunday, 15 February 2026, Mr. Dwi Gawan Islandhi H.B., who served as an Independent Commissioner of the Company, passed away, thereby creating a vacancy in the position of Independent Commissioner of the Company. In this regard, pursuant to the provisions of Article 17 Verse 2 and Article 20 Verse 7 the Company's Articles of Association in conjunction with Articles 3 and 23 of Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, it is stipulated that members of the Board of Directors and Board of Commissioners shall be appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders for a specific term of office and may be reappointed for a further 1 (one) term.

D. Opportunity for Questions and Answers

Before making a decision, the Chairman of the Meeting provides the opportunity for Shareholders or Shareholder Proxies to ask questions and/or provide opinions on each Meeting Agenda. For Agenda Item 1, there were responses given, while for Agenda Items 2 to 7, there were no Shareholders or proxies who raised questions or opinions.

E. Decision Making Mechanism

All decisions of the Meeting are taken based on deliberation for consensus. In the event that a Shareholder or Shareholder's Proxy does not approve or vote for abstention, the decision will be taken by voting.

F. Decisions of the Meeting

The resolutions of the Company's Meetings are as follows:

The First Agenda of Meeting			
Total Number of Shareholders Delivering Questions	There was 1 (one) Shareholder who submitted a response.		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
	6,069,570,822 shares 99.674% of the attending parties	292,800 shares 0.005% of the attending parties	19,548,600 shares 0.321% of the attending parties
Results of the First Meeting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approving the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2025 Financial Year ending December 31, 2025. 2. Ratifying the Company's Consolidated Financial Statements for the 2025 Financial Year ending December 31, 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) as stated in its report Number: 00295/2.1030/AU.1/04/1680-5/1/III/2026 dated March 26, 2026, with the opinion "Fair in all material respects." 3. With the approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements in their entirety for the 2025 Financial Year ending on December 31, 2025, the GMS grants full release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) to all members of the Board of Directors for their management of the Company and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions for the Company that have been carried out during the 2025 Financial Year ending on December 31, 2025, as long as these actions do not constitute a criminal offense and are reflected in the report above. 		

The Second Agenda of Meeting			
Total Number of Shareholders Delivering Questions	None of the Shareholders asked questions.		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
	6,069,570,822 shares 99.674% of the attending parties	292,800 shares 0.005% of the attending parties	19,548,600 shares 0.321% of the attending parties
Results of the Second Meeting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determining the use of Net Profit attributable to Owners of the Parent Entity for the Financial Year ending December 31, 2025, amounting to Rp40,019,501,701 (Forty Billion Nineteen Million Five Hundred One Thousand Seven Hundred One Rupiah) as follows: <ol style="list-style-type: none"> a. 10% (Ten Percent) of Net Profit, or Rp4,009,114,636 (Four Billion Nine Million One Hundred Fourteen Thousand Six Hundred Thirty-Six Rupiah), shall be allocated as Cash Dividends to Shareholders, or Rp0.46 (Zero Point Forty-Six Rupiah) per share. b. 90% (Ninety Percent) of Net Profit, or Rp36,010,387,065 (Thirty-Six Billion Ten Million Three Hundred Eighty-Seven Thousand Sixty-Five Rupiah), shall be allocated as other reserves. 		

	2. Granting authority and power to the Board of Directors, with the right of substitution, to further regulate the procedures and implementation of cash dividend distribution in accordance with applicable regulations, including rounding dividend payments per share.
--	---

The Third Agenda of Meeting			
Total Number of Shareholders Delivering Questions	None of the Shareholders asked questions.		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
	6,069,570,822 shares 99.674% of the attending parties	292,800 shares 0.005% of the attending parties	19,548,600 shares 0.321% of the attending parties
Results of the Third Meeting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determining the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm (KAP) Heliantono and Partners to audit the Company's Consolidated Financial Statements and other Reports for the 2026 Financial Year. 2. Approving the granting of authority to the Company's Board of Commissioners, with prior written approval from the Majority Shareholder, to: <ol style="list-style-type: none"> a. Appointing a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for other periods in the 2026 Financial Year for the purposes and interests of the Company; and b. Determining the audit fee and other requirements for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, and to appoint a Replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the Heliantono and Partners Public Accounting Firm, for whatever reason, is unable to complete the audit services for the Company's Consolidated Financial Statements for the 2026 Financial Year and/or other periods in the 2026 Financial Year, including determining the audit fee and other requirements for the Replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm. 		

The Fourth Agenda of Meeting			
Total Number of Shareholders Delivering Questions	None of the Shareholders asked questions.		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
	6,069,570,822 shares 99.674% of the attending parties	207,800 shares 0.004% of the attending parties	19,633,600 shares 0.322% of the attending parties
Results of the Fourth Meeting	<p>Approving the granting of power and authority to:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) the Majority Shareholder to appoint members of the Board of Commissioners; and b) the Board of Commissioners, with prior written approval from the Majority Shareholder, to appoint members of the Board of Directors, salaries/honorariums, including facilities and allowances for the 2026 Financial Year and remuneration for performance for the 2025 Financial Year in accordance with applicable regulations. 		

The Fifth Agenda of Meeting			
Total Number of Shareholders Delivering Questions	None of the Shareholders asked questions.		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
	6,069,655,822 shares 99.675% of the attending parties	207,800 shares 0.004% of the attending parties	19,548,600 shares 0.321% of the attending parties
Results of the Fifth Meeting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approving the Amendment to the Company's Articles of Association as outlined in the matrix presented; 2. Approving the amendment to the Articles of Association of the Company related to Decision point 1 above; 3. Granting power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution to take necessary actions related to the decisions of the Fifth Meeting agenda item, including drafting and restating the entire Company's Articles of Association in a Notarial Deed, making changes to the Company's data, and submitting them to the authorized agency for approval and/or receipt of notification of the amendment to the Company's Articles of Association and changes to the Company's data, and doing everything deemed necessary and useful for these purposes, with nothing excluded, including making additions and/or changes to the amendment to the Company's Articles of Association if required by the authorized agency. 		

The Sixth Agenda of Meeting			
Total Number of Shareholders Delivering Questions	None of the Shareholders asked questions.		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
	6,069,655,822 shares 99.675% of the attending parties	207,800 shares 0.004% of the attending parties	19,548,600 shares 0.321% of the attending parties
Results of the Sixth Meeting	Approving the granting of power and authority to the Company's Board of Commissioners by first obtaining written approval from the Majority Shareholder, to approve the Company's RJPP for 2026-2030 and the Company's RKAP for 2027 along with its amendments. Approval of the Company's RJPP for 2026-2030 and the Company's RKAP for 2027 along with its amendments to be implemented in accordance with good corporate governance and applicable provisions by taking into account the principles of fairness and information transparency, and has been coordinated with the Majority Shareholder.		

The Seventh Agenda of Meeting									
Total Number of Shareholders Delivering Questions	None of the Shareholders asked questions.								
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree						
	6,069,655,822 shares 99.675% of the attending parties	207,800 shares 0.004% of the attending parties	19,548,600 shares 0.321% of the attending parties						
Results of the Seventh Meeting	<p>Approving the proposed changes in accordance with the Majority Shareholder Letter Number SE.01.00/A.DIR.00189/2026 dated 13 May 2026 as read out, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Confirming the Dismissal of Mr. Dwi Gawan Islandhi H.B. as Independent Commissioner who was appointed based on Deed Number 25 dated June 12, 2025, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notary in South Jakarta, effective February 15, 2026, with gratitude for all contributions of energy and thoughts during his tenure as Independent Commissioner of the Company. 2. Honorably dismiss the names below: <ol style="list-style-type: none"> a. Mr. Agus Pramono as Director of Operations and Supply Chain Management appointed based on Deed Number 74 dated May 30, 2024, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notary in South Jakarta b. Mr. Tjia Marwan as Commissioner appointed based on Deed Number 25 dated June 12, 2025, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notary in South Jakarta effective as of the closing of this GMS, with thanks for all contributions of energy and thought during his/her term as Director and Board of Commissioners of the Company. 3. Change the nomenclature of positions of members of the Company's Board of Directors as follows: <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Previous</th> <th>Current</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Director of Operations and Supply Chain Management</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> 4. To appoint the names below as members of the Company's Board of Commissioners as follows: <ol style="list-style-type: none"> a. Mr. Andrianto as Commissioner; b. Mrs. Noor Aljanna Fitri Gayo as Independent Commissioner; c. Mrs. Indriani Widiastuti as Commissioner. <p>effective from the closing of this GMS with a term of office in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, taking into account the Laws and Regulations and without reducing the right of the GMS to dismiss at any time.</p> 5. For members of the Company's Board of Commissioners who will be appointed as referred to in number 4 and are still holding other positions which are prohibited by statutory regulations from being held concurrently with the position of Board of Commissioners of a State-Owned Enterprise Subsidiary, then the person concerned must resign or be dismissed from these positions. 6. With the confirmation of the dismissal, termination, change in the nomenclature of positions and appointment of the Board of Commissioners and Directors as mentioned above, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors is as follows: <p>Board of Commissioners:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mr. Wilan Oktavian as President Commissioner; b. Mr. Andrianto as Commissioner; c. Mrs. Indriani Widiastuti as Commissioner; d. Mrs. Noor Aljanna Fitri Gayo as Independent Commissioner. <p>Directors:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mr. Kuntjara as President Director; b. Mr. Rija Judaswara as Director of Marketing and Development; c. Mr. Syailendra Ogan as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management; d. Mr. Verly Widianoro as Director of Engineering and Production 			No	Previous	Current	1.	Director of Operations and Supply Chain Management	-
No	Previous	Current							
1.	Director of Operations and Supply Chain Management	-							

	7. Granting power of attorney with the right of substitution to the President Director and/or other Directors of the Company to carry out all necessary actions related to the decisions of this agenda item in accordance with the applicable laws and regulations, including to state in a separate Notarial Deed, appear before a Notary or authorized official and make necessary adjustments or improvements if required by the authorized party for the purposes of implementing the contents of this Decision and notify the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners to the Ministry of Law in accordance with applicable provisions.
--	---

The Company's Meeting closed at 16.59 Western Indonesian Time.

G. Schedule and Terms of Payment of Cash Dividend for the Fiscal Year 2025

In accordance with the decision on the Second Meeting Agenda, it is hereby notified that the Company has determined a cash dividend from the Net Profit Attribution of Owners of the Company's Parent Entity for the Financial Year ending on 31 December 2025 amounting to Rp4,009,114,636.- (Four Billion Nine Million One Hundred Fourteen Thousand Six Hundred Thirty-Six Rupiah) to be distributed to Shareholders so that the Cash Dividend to be paid is Rp0.46,- (Zero Point Forty Six Rupiah) per share which will be distributed to the Company's Shareholders with the following schedule and procedures:

1. Schedule:

NO	DESCRIPTION	DATE
1	End of Stock Trading Period with the Dividend Right (Cum Dividen)	
	a. Regular Market and Negotiation b. Cash Market	25 May 2026 29 May 2026
2	Early Stock Trading Period with the Dividend Right (Ex Dividen)	
	a. Regular Market and Negotiation b. Cash Market	26 May 2026 02 June 2026
3	Date of Register of Shareholders entitling to have the Dividend (Recording Date)	29 May 2026
4	Date of Cash Dividend Payment for the Fiscal Year 2025	12 June 2026

2. Terms of Payment of Cash Dividend:

- a. Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders ("DPS") or recording date on **29 May 2026** and/or owners of company shares in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on closing of trading on the Indonesia Stock Exchange on **29 May 2026**.
- b. For Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on **12 June 2026** into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities company and/or Custodian Bank where the Shareholders open a securities account. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, the cash dividend payment will be transferred to the Shareholders' account.
- c. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
- d. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate taxpayer ("WP Badan DN") and the Company does not deduct Income Tax on the cash dividends paid to the Domestic Entity Taxpayer. the. Cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayers ("WPOP DN") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPH") in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the WPOP DN concerned in accordance with the provisions of Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
- e. Shareholders can obtain confirmation of dividend payments through securities companies and or custodian banks where shareholders open securities accounts, then shareholders must be responsible for reporting dividend receipts referred to in tax reporting for the tax year concerned in accordance with the applicable tax laws and regulations.
- f. Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax withholding will use a rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Application of Double Taxation Avoidance Agreement and submitting proof of record or receipt of DGT/SKD that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes, in accordance with the rules and regulations stipulated by KSEI, without the said document, cash dividends The amount paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.

Jakarta, 18 May 2026
PT Wijaya Karya Beton Tbk
Directors